

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2006).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).

- Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Ke-5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upata Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- _____, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Press)
- _____, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- _____, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)

_____, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*,
Cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1998).

Sudarmanto, *Pemalsuan Surat Dan Memasukkan Keterangan Palsu Ke
Dalam Akta Autentik*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2010).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana,
2012).

B. Jurnal

Arsiendy Aulia, *Prinsip Kehati-hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual
Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum*, Jurnal
Recital Review, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928.

Ida Ayu Wulan Rismayanthi, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang
Menjadi Objek Sengketa*, dalam Jurnal Ilmiah Prodi Magister
Kenotariatan Acta Comitatus Nomor 1, Juni 2016.

Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh, *Mapping Legal Research*, The
Cambridge Law Journal, 71 (3), November 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol. 16 No. 1 Maret-
April, 2001.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Penelitian Hukum Normatif*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX November–Desember , (Surabaya: Universitas Airlangga).

Purna Noor Aditama, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 3 Januari 2018: 189 – 205.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Kode Etik PPAAT”)

Universitas Pelita Harapan, Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (Universitas Pelita Harapan: 2022).

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Putusan 137/Pdt.G/2020/PN Bgr.

E. Kamus atau Encyclopedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

F. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Gudesi Rayadin, Notaris dan PPAT Kota Bekasi,
Kantor Notaris dan PPAT Gudesi Rayadin, Kota Bekasi, Tanggal
31 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

